

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandarlampung sebagai ibukota Provinsi Lampung yang merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta pariwisata. Secara geografis kota Bandarlampung berada terletak pada kedudukan 5*20' sampai dengan 5*30' lintang selatan dan 105*28 sampai dengan 105*37' bujur timur. Kota Bandarlampung memiliki luas wilayah 197,22 km², yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

B. Kondisi Topografi dan Demografi

Kota Bandarlampung sebagian besar terletak di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- a. Daerah pantai yaitu Telukbetung dan Panjang
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara
- a. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan batu serampok di bagian timur selatan
- c. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Kota Bandarlampung juga terdapat beberapa aliran sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya Way Awi, Way Balau, Way Kuala, Way Simpur dan lain-lain, yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti pertanian dan kegiatan keseharian masyarakat. Dimana panjang sungai-sungai di Bandarlampung umumnya tidak begitu panjang antara 2-14 Km. Selain itu wilayah Bandarlampung merupakan perbukitan diantaranya, Gunung Klutum, Gunung Kunyit, Gunung Kapuk dan lain-lain.

Secara demografis, kota Bandarlampung terdiri dari banyak etnik, sehingga bisa dibilang kota Bandarlampung bersifat heterogen, dengan jumlah penduduk sebesar 902.855 jiwa (Bps 2012), dengan data per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandarlampung, berdasarkan Jenis kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kedaton	38.508	34.445	72.953
2	Sukarame	38.458	34.985	73.443
3	Tanjung Karang Barat	38.719	35.438	74.157
4	Tanjung Karang Pusat	37.767	34.428	72.195
5	Tanjung Karang Timur	29.490	26.794	56.284
6	Teluk Betung Utara	32.158	29.853	62.011
7	Teluk Betung Barat	19.021	16.930	35.951
8	Teluk Betung Selatan	26.172	23.744	49.916
9	Teluk Betung Timur	27.850	24.913	52.763
10	Bumi Waras	35.691	32.339	68.030
11	Kedamaian	26.019	23.821	49.840
12	Enggal	21.095	19.565	40.660
13	Langkapura	15.160	13.864	29.024
14	Panjang	50.331	45.955	96.286
15	Kemiling	42.172	38.950	81.122
16	Rajabasa	42.172	38.950	81.122
17	Labuhan Ratu	31.946	28.746	60.692
18	Sukabumi	36.600	33.021	69.621
19	Tanjung Senang	28.494	26.379	54.873
20	Way Halim	47.686	44.477	92.163
	Jumlah Total	654.757	596.885	1.251.642

(Sumber :Bps tahun 2013)

Berdasarkan pada tabel diatas, bisa dilihat sebaran penduduk Bandarlampung berdasarkan jenis kelamin, yang terpadat adalah Kecamatan Panjang sebesar 96.286 jiwa, sementara jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Langkapura dengan jumlah sebesar 29.024 jiwa, dari jumlah penduduk kota Bandarlampung sebesar 1.251.642 jiwa, secara keseluruhan.

C. Sejarah Singkat Kota Bandarlampung

Secara Administratif Bandarlampung terbentuk pada tanggal 17 Juni 1983 sebagai bagian dari wilayah kota dalam pembentukan keresidenan propinsi Lampung, yang ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1964. Kota Bandarlampung pada awalnya adalah Kotapraja Tanjung Karang – Teluk Betung yang berstatus sebagai kota kecil. Kemudian pada tahun 1975, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Bandarlampung diperluas dengan pemekaran dari semula 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kedaton
2. Kecamatan Sukarame
3. Kecamatan Tanjung Karang Barat
4. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
5. Kecamatan Tanjung Karang Timur
6. Kecamatan Teluk Betung Utara
7. Kecamatan Teluk Betung Barat
8. Kecamatan Teluk Betung Selatan
9. Kecamatan Teluk Betung Timur

10. Kecamatan Bumi Waras
11. Kecamatan Kedamaian
12. Kecamatan Enggal
13. Kecamatan Langkapura
14. Kecamatan Panjang
15. Kecamatan Kemiling
16. Kecamatan Labuhan Ratu
17. Kecamatan Sukabumi
18. Kecamatan Tanjung Senang
19. Kecamatan Rajabasa
20. Kecamatan Wayhalim

D. Para Walikota Bandar Lampung

Sampai saat ini, tercatat sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2 : Nama-Nama Walikota Bandar Lampung dari tahun ke tahun

NO	NAMA	PERIODE
1.	SUMARSONO	1956 – 1957
2.	H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	1957 – 1963
3.	ALIMUDIN UMAR, SH	1963 – 1969
4.	Drs. H.M. THABRANIE DAUD	1969 – 1976
5.	Drs. H. FAUZI SALEH	1976 – 1981
6.	Drs. ZULKARNAIN SUBING	1981 – 1986
7.	Drs. NURDIN MUHAYAT	1986 – 1991
8.	Drs. SUHARTO	1996 – 2005
9.	Drs. EDDY SUTRISNO, M.Pd.	2005 – 1010
10.	Drs. H. HERMAN HN, MM	2010– Sekarang

Sumber: BPS tahun 2013

E. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Proses Perpindahan tampuk kekuasaan politik di dalam pemilihan umum menjadi ciri dari negara demokratis salah satunya adalah Indonesia. Perpindahan acapkali menjadi krusial dan penuh dengan ketegangan-ketegangan karena dapat dimungkinkan perpindahan kekuasaan mewujudkan kecurangan-kecurangan tertentu yang melanggar undang-undang, seperti misalnya *money politics*, Kampanye Hitam yang menjatuhkan nama baik lawan melalui media massa ataupun media sosial berbasis internet. Untuk itulah dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Pemilu menjadi ajang perebutan kekuasaan ini perlu diatur dan dikontrol demi terciptanya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Mewujudkan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidaklah mudah, butuh peran dan kerjasama baik masyarakat maupun para penyelenggara negara. Untuk itulah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kemudian didirikan. Sebagai sebuah institusi yang berdiri Independen. Badan Pengawas Pemilu bertugas mewujudkan :

Dipatuhinya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan.

Jaminan derajat kompetisi politik yang sehat, partisipatif, representatif, akuntabel, berkualitas, efektif dan efisien.

Terlaksananya seluruh jadwal dan tahapan pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mulyono, dkk. (2014:2).

F. Sejarah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Berdasarkan keterangan HD (50) Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas pengawas pemilu atau yang biasa di sebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup di sebut Panwas. Menurut undang-undang Pemilu, Panwas Pemilu sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedangkan di Provinsi di sebut Panwaslu Provinsi, di Kabupaten/Kota di sebut Panwaslu Kabupaten Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah Lembaga *Adhoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran Pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon pemilih dalam pemilu dilantik. Lembaga Pengawas Pemilu adalah khas Indonesia, dimana pengawas pemilu di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Pada proses pelaksanaan pemilu 1955 sama sekali tidak ada Lembaga Pengawas Pemilu, Lembaga Pengawas Pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukam Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes atas banyaknya pelanggaran ini kemudian direspon Pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan ABRI.

Akhirnya kemudian muncul gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982.

Tuntutan-tuntutan terus dilakukan oleh parpol-parpol kali ini banyak terdiri dari PPP dan PDI, dengan desakan dari kedua partai tersebut pemerintah menyetujui untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga membuat badan organisasi baru dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilihan Umum) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum ini tetap diaktifkan untuk pemilu 1999, namun dengan perubahan nama baru menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu),

Perubahan terhadap Panwaslu baru dilakukan setelah disahkan dan diberlakukannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003, isinya menegaskan untuk pengawasan pemilu di bentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

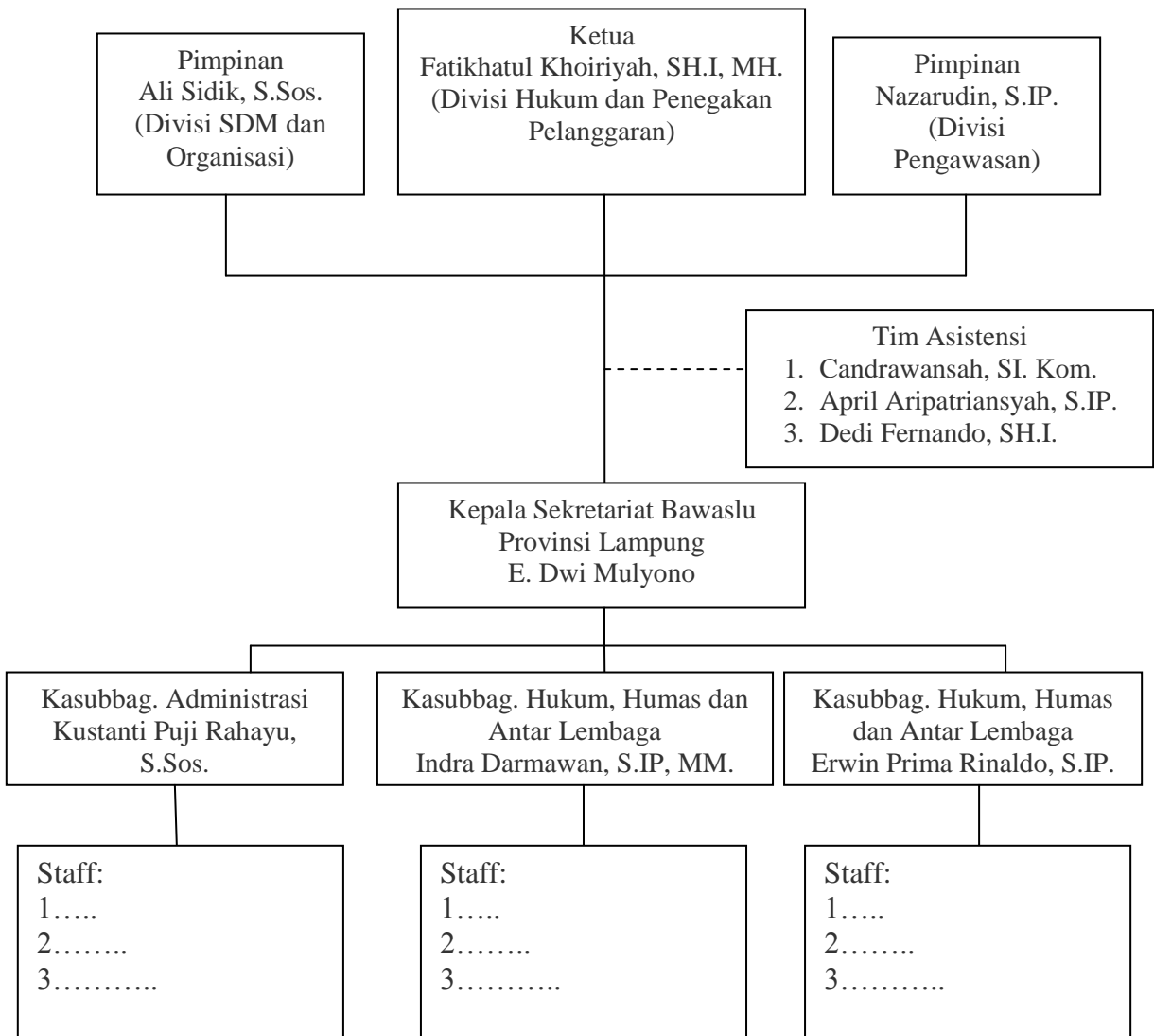
G. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Secara umum Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung maupun Panwaslu Kota Bandar Lampung dipimpin oleh tiga "*komisioner/acesor*" yang dibedakan berdasarkan divisinya

yaitu Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Hukum dan Penengakan Pelanggaran, dan Divisi Pengawasan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan bagan sebagai berikut:

Bagan 2 : Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung



Sumber: Bawaslu 2014

H. Gambaran Umum Pilgub 2014

Berikut ini adalah tabel hasil perolehan suara pada Pilgub Lampung :

Tabel 3 : Perolehan Suara dalam Pilgub Lampung

Nama Calon Gubernur	Kota Metro	Lampung Selatan	Lampung Tengah	Lampung Utara	Lampung Timur	Pringsewu	Tulang Bawang	Bandar Lampung	Way Kanan	Tanggamus	Tuba Barat	Mesuji	Lampung Barat	Pesawaran	Total suara Calon Gubernur	Persentase suara calon gubernur
Berlian-Muklis	10.403	56.946	73.331	42.750	63.685	25.466	19.985	65.440	27.792	48.997	24.894	14.931	101.786	30.160	606.566	15%
Ridho-Bachtiar	32.120	192.273	203.976	169.701	248.741	104.655	97.315	99.548	116.003	135.715	85.409	56.697	83.258	91.122	1.716.533	43%
Herman-Zainudin	21.586	188.283	207.916	91.986	154.919	55.317	66.389	243.368	74.366	87.133	29.006	23.634	37.801	61.059	1.342.763	34%
Alzier-Lukman	14.489	29.702	38.575	14.090	30.296	15.895	10.701	25.329	13.449	25.544	8.050	8.120	11.132	42.720	288.092	7%
Total Suara yang Memilih	78.598	467.204	523.798	318.527	497.641	201.333	194.390	433.685	231.610	297.389	147.359	103.382	233.977	225.061	3.953.954	100%
Persentase Kabupaten/Kota	2%	12%	13%	8%	13%	5%	5%	11%	6%	8%	4%	3%	6%	6%	100%	

Sumber: <http://lampost.co/berita/ini-rekapitulasi-pilgub-lampung-2014> (Di akses tanggal: 25 Mei 2014)

Dari Tabel 3 diatas, terlihat bahwa Ridho-Bachtiar menjadi pemenang dalam Pilgub 2014. Akan tetapi kita akan melihat bahwa Ridho kalah jauh dibandingkan Herman-Zainudin di wilayah Bandar Lampung. Angka ini bukanlah Angka suatu kebetulan saja, saya akan mencoba fokuskan tabel di atas di wilayah Bandar Lampung saja.

Tabel 4 : Perolehan Suara Bandar Lampung

Nama Calon Gubernur	Total Suara di Bandar Lampung	Persentase
Berlian-Muklis	65.440	15%
Ridho-Bachtiar	99.548	23%
Herman-Zainudin	243.368	56%
Alzier-Lukman	25.329	6%
Total Suara yang Memilih	433.685	100%

Sumber: <http://lampost.co/berita/ini-rekapitulasi-pilgub-lampung-2014> (Di akses tanggal: 25 Mei 2014)

Dari Tabel diatas maka kita akan melihat bahwa ternyata Bandar Lampung lebih “memilih” Herman-Zainudin dengan perolehan yang cukup telak mencapai 56%. Aspek demografis dan sasaran target para calon dalam perolehan suara menjadi penting dalam mempengaruhi perolehan suara di setiap daerah. Seperti misalnya Herman-Zainudin yang memusatkan perhatiannya pada Kota Bandar Lampung (mendapat 56% suara), Sedangkan Ridho-Bachtiar memiliki daerah pilihan lebih cenderung meluas dengan memilih sasarannya di wilayah seperti wilayah Metro (mendapat 41% suara), Lampung Selatan (mendapat 41% suara),

Lampung Utara (mendapat 53% suara), Lampung Timur (mendapat 50% suara), Pringsewu (mendapat 52% suara), Tulang bawang (mendapat 50% suara), Way Kanan (mendapat 50% suara), Tanggamus (mendapat 46% suara), Tulang Bawang Barat (mendapat 58% suara), Mesuji (mendapat 55% suara), Pesawaran (mendapat 40% suara). Berdasarkan apa yang saya uraikan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ridho-Bachtiar menguasai perolehan suara di banyak wilayah Lampung.

Persentase yang tidak seimbang ini, misalnya antara Ridho-Bachtiar dan Herman-Zainudin yang hanya menguasai perolehan suara di Bandar Lampung saja, menjadikan “Modal” misalnya uang dan massa yang dimiliki seorang Calon Gubernur dalam melakukan ekspansi kampanyenya menjadi sangat penting. Kita ketahui untuk melakukan kampanye membutuhkan modal yang tidak sedikit, oleh karenanya kemampuan ekonomi sang calon tentunya mempengaruhi seberapa luas mereka melakukan kampanye. Ridho-Bachtiar menjadi tak terkalahkan dalam Pilgub karena ekspansinya yang sangat masif dan besar-besaran.

I. Angka Partisipasi Pilgub Masyarakat Kota Bandar Lampung

Berikut adalah tabel penduduk potensial pemilih Pemilu Provinsi Lampung di Tahun 2013

Tabel 5: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi Lampung Tahun 2013

NO	KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	18.01	Lampung Selatan	805.964
2	18.02	Lampung Tengah	1.048.964
3	18.03	Lampung Utara	672.281
4	18.04	Lampung Barat	354.516
5	18.05	Tulang Bawang	462.984
6	18.06	Tanggamus	454.234
7	18.07	Lampung Timur	817.720
8	18.08	Way Kanan	342.512
9	18.09	Pesawaran	402.971
10	18.10	Pringsewu	379.372
11	18.11	Mesuji	249.033
12	18.12	Tulang Bawang Barat	165.179
13	18.71	Bandar Lampung	885.855
14	18.72	Metro	116.109
		JUMLAH TOTAL	7.157.306

Sumber : Pemerintah Provinsi Lampung 2013

Kita ketahui bahwa angka potensial pemilih dalam pemilu di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 885.855 pemilih. Tetapi kita juga dapat melihat angka partisipasi masyarakat dalam Pilgub pada tahun 2014 hanya mencapai 473.560, atau hanya sebesar 53% dari keseluruhan pemilih potensial di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilgub di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh banyak faktor, utamanya karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon gubernur dan partai politik yang maju di tahun 2014. Para aktor ini menyumbang besar dalam

minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. sehingga pada kenyataannya berdasarkan hal tersebut kita melihat seakan-akan kaum elit cenderung berlomba-lomba (berkontestasi) di dalam Pemilu dalam perebutan dan persaingan kursi lembaga pemerintahan bahkan banyaknya elit politik ini melakukan kecurangan-kecurangan seperti *Money Politics* dan Bahkan *Black Campaign*, sementara rakyat biasa cenderung merasa semakin jenuh dan pasif karena dipandang tingkah-laku para elit politik yang hanya bersaing demi kepentingan kekuasaan, memperkaya diri, mengumbar janji-janji yang utopis, dan bahkan melakukan *money politics*. Sementara rakyat kemudian menganggap elit politik yang mencalonkan diri cenderung tidak bisa dipercaya apalagi berpihak kepada kepentingan rakyat. menjadikan peran serta masyarakat sangat minim dalam pemilu yang di selenggarakan KPU di tahun 2014 ini.

Berikut adalah tabel data pemilih Pilgub Tahun 2014:

Tabel 6 : Jumlah suara yang di peroleh dalam Pilgub

Nama Calon	Jumlah
Berlian-Muklis	65.440
Ridho-Bachtiar	99.548
Herman-Zainudin	243.368,00
Alzier-Lukman	25.329
Suara sah:	433.685
Tidak sah:	39.695
Jumlah pemilih:	473.560

Sumber: <http://lampost.co/berita/ini-rekapitulasi-pilgub-lampung-2014> (Di akses tanggal: 25 Mei 2014)

Selain karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon yang maju dalam Pilgub 2014, ada beberapa faktor lain yang menjadi permasalahan pendataan daftar pemilih tetap yang menjadi permasalahan baik itu oleh Bawaslu maupun KPU. Pasifnya masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih menjadi kendala tersendiri dalam pendataan oleh KPU. Jangankan melakukan pendataan dalam pemilu, dalam melakukan pendataan kependudukan dan catatan sipil masyarakat seperti misalnya perpindahan penduduk cenderung pasif melakukannya. Hal ini tentunya menjadikan banyak masyarakat yang dalam pendataannya tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap menjadikan masyarakat cenderung kurang partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan umum dan mensia-siakan hak suaranya.

Berdasarkan hal di atas, di dalam buku yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berjudul "*Pengawasan Pemilu Tahun 2014*" menjelaskan bahwa daftar pemilih tetap merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemutakhiran data pemilih merupakan kewajiban untuk dilakukan secara teliti, cermat, sistematis dan serinci mungkin. Namun, teliti sistematis dan serinci mungkin kemudian menjadi masalah ketika KPU menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendataan penduduk yang mana hal ini menjadikan data kurang akurat. Tindakan seperti perpindahan domisili penduduk, tercatat dua kali atau lebih dalam wilayah yang berbeda, atau warga yang meninggal dunia menjadi sumber utama mengapa pendataan penduduk menjadi kurang akurat.

2. Permasalahan akses di daerah-daerah yang terisolir, serta luasnya daerah pemutakhiran data menjadikan pendataan di daerah tersebut juga kurang akurat.
3. Mobilitas penduduk yang tinggi di daerah-daerah tertentu yang padat, menyebabkan pemutakhiran data semakin sulit dilakukan.
4. Kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung pemutakhiran data pemilih.
5. Kurangnya peran serta masyarakat peserta pemilu dan media massa dalam melakukan sosialisasi pentingnya pemutakhiran data kependudukan.